



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN TOBA
MENURUT PENGELUARAN
2019-2023**



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TOBA**

<https://tobasamosirkab.bps.go.id>

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN TOBA
MENURUT PENGELUARAN
2019-2023**



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TOBA**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN TOBA
MENURUT PENGELUARAN 2019-2023**

No Publikasi : 12060.24004
Katalog : 9301005.1206

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xii+63 halaman

Penyusun Naskah :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba

Penyunting Naskah :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba

Gambar Kulit :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba

Diterbitkan Oleh :
© Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba

Dicetak Oleh :
CV. Rilis Grafika

*“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial
tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”*

TIM PENYUSUN
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN TOBA
MENURUT PENGELUARAN 2019-2023

Penanggung Jawab Umum : Drs. Whenlis, M.Si

Penanggung Jawab Teknis : Sartika C.Y. Pardede, SST, MM

Penyunting : Sartika C.Y. Pardede, SST, MM

Penulis : Jenni Hariaty Tarigan, S.Tr.Stat

Pengolah Data : Jenni Hariaty Tarigan, S.Tr.Stat

Infografis : Jenni Hariaty Tarigan, S.Tr.Stat.

Gambar Kulit : Jenni Hariaty Tarigan, S.Tr.Stat.

<https://tobasamodir.kab.toba.go.id>

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu : pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor serta Impor. Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Balige, April 2024
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Toba



Drs. Whenlis, M.Si

DAFTAR ISI
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN TOBA
MENURUT PENGELUARAN 2019-2023

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB).....	3
1.2 KEGUNAAN PDRB.....	4
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA.....	7
2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PK-RT)	9
2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT)..	12
2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)...	14
2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	17
2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI).....	19
2.6 EKSPOR - IMPOR.....	21
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN TOBA MENURUT PDRB PENGELUARAN 2019-2023	23
3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB KABUPATEN TOBA MENURUT PENGELUARAN.....	25
3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA....	31
3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT.....	32
3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH.....	33
3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	36

3.6	PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI.....	38
3.7	PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA.....	39
3.8	PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA	40
BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN	
	KABUPATEN TOBA 2019-2023.....	43
4.1	PDRB (NOMINAL).....	45
4.2	PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR	
	TERHADAP PDRB.....	46
BAB V	PENUTUP	49
TABEL TABEL	53
DAFTAR PUSTAKA	63

<https://tobasamesirkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	PDRB Kabupaten Toba ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023	26
Tabel 3.2	PDRB Kabupaten Toba ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023	27
Tabel 3.3.	Distribusi PDRB Kabupaten Toba ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023	28
Tabel 3.4.	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Toba ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023	29
Tabel 3.5.	Indeks Implisit PDRB Kabupaten Toba Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023	30
Tabel 3.6.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Toba Tahun 2019-2023	31
Tabel 3.7.	Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Toba Tahun 2019-2023	33
Tabel 3.8.	Perkembangan Komponen Konsumsi Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2019-2023.....	34
Tabel 3.9.	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Toba Tahun 2019-2023	37
Tabel 3.10.	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Toba Tahun 2019-2023	39
Tabel 3.11.	Perkembangan Ekspor Kabupaten Toba Tahun 2019-2023	40
Tabel 3.12.	Perkembangan Impor Kabupaten Toba Tahun 2019-2023.....	41
Tabel 4.1.	PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Toba Tahun 2019-2023	45
Tabel 4.2.	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Toba Tahun 2019-2023.....	46
Tabel 6.1.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Toba ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023	55
Tabel 6.2.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Toba ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023	56
Tabel 6.3.	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Toba ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023.....	57
Tabel 6.4.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Toba ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023	58

Tabel 6.5.	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Toba ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023.....	59
Tabel 6.6.	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Toba ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023.....	60
Tabel 6.7.	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Toba Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023.....	61
Tabel 6.8.	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Toba Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023.....	62

<https://tobasamosirkab.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Perbandingan PDRB Kabupaten Toba ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023	27
Grafik 3.2. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Toba ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023	30
Grafik 3.3. Rasio Jumlah Penduduk dengan Jumlah Pegawai Pemerintah Kabupaten Toba 2019-2023.....	36
Grafik 3.4. Laju Pertumbuhan Sub Komponen PMTB Kabupaten Toba Tahun 2019-2023	38

<https://tobasamosirkab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

PENDEKATAN PDRB



PRODUKSI



PENDAPATAN



PENGELUARAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah regional tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. Sementara PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode berikutnya (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah regional suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi, 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah regional dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Dalam publikasi ini disajikan PDRB dengan pendekatan pengeluaran dirinci menurut komponen permintaan akhir yang telah disebutkan sebelumnya.

1.2 KEGUNAAN PDRB

Data PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah regional. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah regional.

4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah regional.

<https://tobasamosirkab.bps.go.id>

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

KOMPONEN PDRB MENURUT PENGELUARAN



PKRT



PK-LNPRT



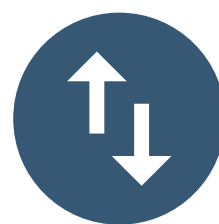
PKP



PMTB



PERUBAHAN
INVENTORI



EKSPOR NETO

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *regency*..

Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*), sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumah-tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi

9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sbb:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PK-RT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi

rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.

- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PK-RT adalah:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan.
- Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga Triwulanan (SKKRT) BPS
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

v. Metode Estimasi

Selama ini, penghitungan PK-RT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data atau indikator *suplay* dari berbagai sumber data di luar Susenas. *Adjustment* dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Sebagai contoh: data hasil Survei Biaya Hidup (SBH) digunakan untuk *adjustment* kondisi rumah tangga di wilayah perkotaan.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PK-RT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-RT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-RT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PK-RT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PK-RT hasil Susenas:

- Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu $\times (30/7) \times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun

- Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Data poin ke 1 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;
 3. Terhadap data poin ke 2 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;
 4. Diperoleh nilai PK-RT tahunan atas dasar harga berlaku;
 5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
 6. PK-RT atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumahtangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON-PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT)

i. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) merupakan bagian dari pengeluaran lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;

- Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- Istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut diestimasi berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber data

- a. Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit yang melayani rumah tangga (SKLNP). Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT)
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT.

Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.

d. Indeks Harga Konsumen (IHK)

v. Metode Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metode sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lain-nya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas

konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb:

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metode:

$$\text{PK-P atas dasar harga Berlaku} = \text{Output} - \text{Penjualan barang dan jasa} + \text{Social transfer in kind purchased market production} + \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-deflate PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
<i>Social Transfer in kind</i>	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii. Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii. Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan

dan aset yang dipatenkan;

3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv. Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalan (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v Metode estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metode langsung ataupun metode tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

- ✓ Metode Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM +
Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea
Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB
atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHE}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

- ✓ Metode Tidak Langsung:

Pendekatan Supply : $\text{PMTB atas dasar harga Berlaku} = \text{Total Supply Barang} \times \text{Rasio PMTB}$

Pendekatan Ekstrapolasi : $\text{PMTB atas dasar harga Konstan (t)} = \text{PMTB atas dasar harga k (t-1)} \times \text{Indeks Produksi (t)}$

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periodedengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumahtangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/ BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;

4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data eskternal lain, seperti data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.

v **Metode Estimasi**

Untuk mengestimasi komponen Perubahan Inventori (PI) dapat menggunakan 2 (dua), yaitu metode revaluasi atau metode deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metode Revaluasi

Metode ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = Volume inventori (t) - Volume inventori (t-1) x

Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

b. Metode Deflasi

Metode ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t) -

Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar hargaKonstan x IHPB rata-rata (t)

2.6 EKSPOR DAN IMPOR

i **Pendahuluan**

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah

yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan kesuatu wilayah.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antarresiden wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Import ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor keluar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv Sumber Data

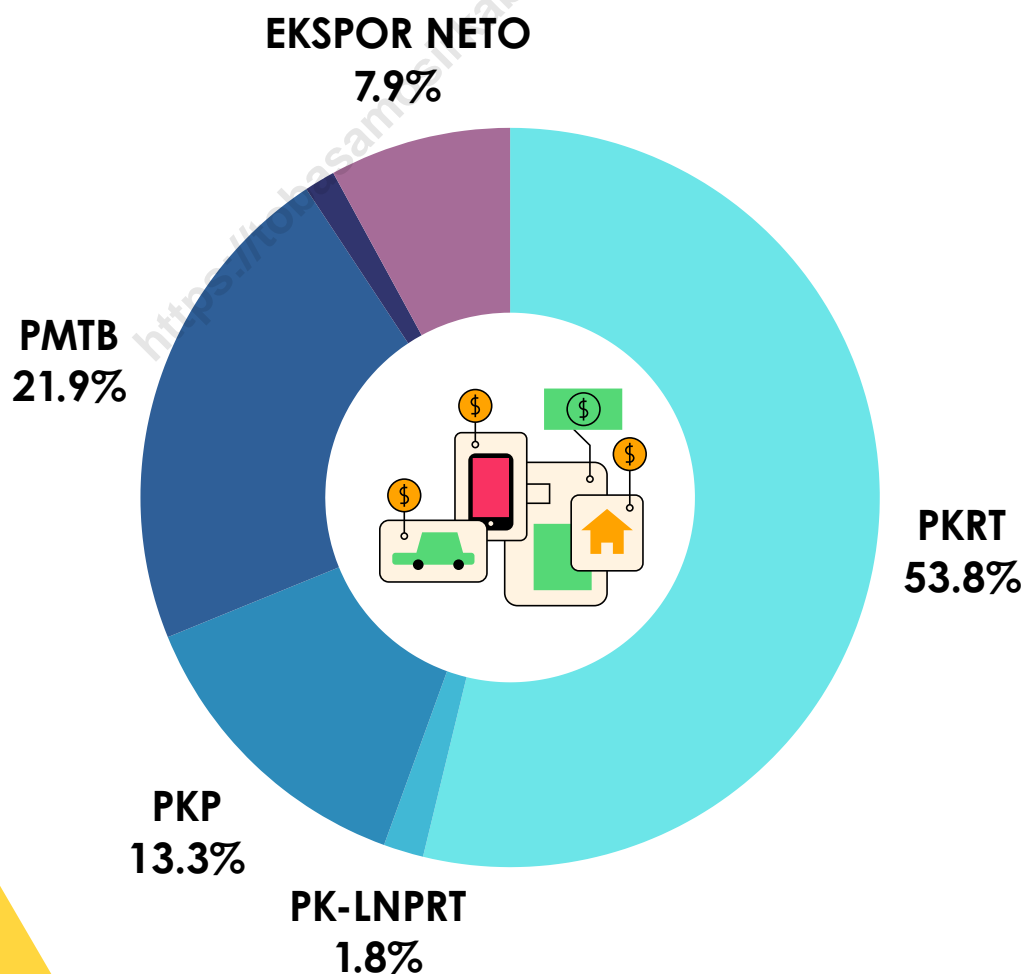
Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metode tidak langsung.

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN

KABUPATEN TOBA

DISTRUBUSI PRDB MENURUT PENGELUARAN 2023



BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN TOBA MENURUT PDRB PENGELUARAN 2019-2023

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh perkembangan ataupun perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir akhir. Sedangkan faktor eksternal lebih dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global akibat adanya perdagangan internasional.

Setiap komponen dalam PDRB Pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Kajian atau analisis terhadap komponen PDRB, yaitu : konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT dan Pemerintah); Investasi (PMTB dan Inventori), dan net ekspor (ekspor dikurangi impor) bukan hanya dari arah perubahan struktur, tetapi juga dari sisi pertumbuhan. Dalam analisis ekonomi makro, ke tujuh komponen tersebut juga sering digunakan sebagai dasar dalam melakukan proyeksi atau prediksi perekonomian.

3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB KABUPATEN TOBA MENURUT PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Ke dua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Kondisi perekonomian Kabupaten Toba terus membaik dari tahun ke tahun. Akan tetapi di tahun 2020, adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, kondisi perekonomian Kabupaten Toba mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun kemudian pada tahun 2021 hingga 2023, kondisi perekonomian Toba

sudah semakin membaik dan sudah kembali normal. Hal ini terlihat dari nilai PDRB, baik Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 maupun Atas Dasar Harga Berlaku mengalami kenaikan hingga tahun 2023.

Tabel 3.1. PDRB Kabupaten Toba ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022 ^{*)}	2023 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4.262,74	4.287,31	4.470,74	4.788,19	5.193,89
2. Konsumsi LNPRT	128,85	131,03	136,66	145,03	169,21
3. Konsumsi Pemerintah	1.146,64	1.137,24	1.155,18	1.177,41	1.283,90
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.624,75	1.620,30	1.756,65	1.902,70	2.111,74
5. Perubahan Inventori	95,94	109,05	116,43	130,27	130,65
6. Ekspor Barang dan Jasa	3.185,83	3.164,40	3.644,16	4.093,31	4.633,27
7. Impor Barang dan Jasa	2.769,37	2.603,91	3.013,71	3.293,02	3.866,39
PDRB	7.675,39	7.845,42	8.266,13	8.943,89	9.656,27

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 3.1, selama periode tahun 2019 – 2023, PDRB Kabupaten Toba ADHB mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Nilai PDRB ADHB tahun 2019 yakni sebesar 7.675,39 miliar rupiah, mengalami peningkatan menjadi sebesar 9.656,27 miliar rupiah pada tahun 2023. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Dari tujuh komponen pembentuk PDRB dari sisi pengeluaran, pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) mempunyai nilai yang paling besar, yaitu 5.193,89 miliar rupiah pada tahun 2023. Komponen lain yang mempunyai nilai besar adalah komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan nilai sebesar 2.111,74 miliar rupiah, yang sebagian besarnya berbentuk bangunan.

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dievaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga).

Tabel 3.2. PDRB Kabupaten Toba ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Tahun 2019 - 2023

(Miliar Rp)

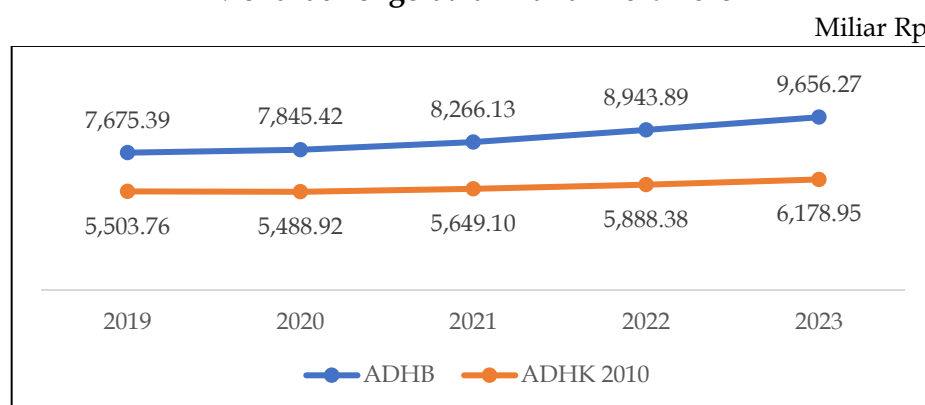
Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022 ^{*)}	2023 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2.886,65	2.850,75	2.932,28	3.046,17	3.158,98
2. Konsumsi LNPRT	98,02	97,19	99,79	104,05	113,23
3. Konsumsi Pemerintah	843,72	841,79	841,45	849,81	880,27
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.096,07	1.078,16	1.131,41	1.194,58	1.276,95
5. Perubahan Inventori	70,14	76,94	78,32	80,77	79,98
6. Ekspor Barang dan Jasa	2.459,63	2.305,87	2.478,62	2.680,37	2.609,25
7. Impor Barang dan Jasa	1.950,46	1.761,79	1.912,77	2.067,37	1.939,71
PDRB	5.503,76	5.488,92	5.649,10	5.888,38	6.178,95

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

PDRB pengeluaran ADHK 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Sama halnya dengan PDRB ADHB, nilai PDRB ADHK 2010 menunjukkan penurunan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, khususnya Kabupaten Toba. Namun sejak tahun 2021 hingga tahun 2023, PDRB Kabupaten Toba ADHK 2010 kembali membaik, sehingga nilainya meningkat dari 5.649,10 miliar rupiah pada tahun 2021 menjadi 6.178,95 miliar rupiah. Selama kurun waktu 2019-2023, gambaran tentang perkembangan ekonomi Toba berdasarkan PDRB ADHK 2010 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Grafik 3.1 Perbandingan PDRB Kabupaten Toba ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023



Grafik 3.1 menggambarkan bahwa pada umumnya nilai PDRB ADHB selalu lebih besar daripada nilai PDRB ADHK 2010. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh perubahan harga yang cenderung meningkat dalam perhitungan nilai PDRB ADHB. Sedangkan dalam perhitungan nilai PDRB ADHK 2010, pengaruh harga tersebut telah dihilangkan.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB tidak terlepas dari kontribusi semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori dan ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor barang dan jasa.

Tabel 3.3 Distribusi PDRB Kabupaten Toba ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022 ^{*)}	2023 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	55,54	54,65	54,09	53,54	53,79
2. Konsumsi LNPRT	1,68	1,67	1,65	1,62	1,75
3. Konsumsi Pemerintah	14,94	14,50	13,97	13,16	13,30
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	21,17	20,65	21,25	21,27	21,87
5. Perubahan Inventori	1,25	1,39	1,41	1,46	1,35
6. Ekspor Barang dan Jasa	41,51	40,33	44,09	45,77	47,98
7. Impor Barang dan Jasa	36,08	33,19	36,46	36,82	40,04
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Dari Tabel 3.3 terlihat bahwa selama periode 2019-2023, PDRB Kabupaten Toba sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) yaitu lebih dari 53 persen. Selain itu, pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni lebih dari 21 persen. Proporsi konsumsi pemerintah berada sekitar 13 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar.

Di sisi lain, pada tahun 2019-2023 perdagangan antar wilayah Kabupaten Toba yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa kecenderungan

perdagangan antar wilayah Kabupaten Toba menunjukkan posisi surplus atau lebih banyak barang/produk dari Kabupaten Toba yang dipasarkan ke luar daerah kabupaten dibandingkan dengan impor. Ekspor juga memiliki peran yang besar karena sekitar 47 persen produk kabupaten Toba menembus pasar antar daerah. Demikian juga dengan impor, sekitar 40 persen permintaan domestik masih dipenuhi dengan produk impor.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 3.4, bahwa pada tahun 2019 berada diatas 4 persen. Akan tetapi pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Toba mengalami kontraksi menjadi sebesar -0,27 persen, yang disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19. Kemudian, pada tahun 2021-2023, pertumbuhan ekonomi Toba kembali membaik yang dapat dilihat dari laju pertumbuhan Toba yang mampu bertumbuh sebesar 2,92 persen pada tahun 2021. Dan pada tahun 2022-2023 laju pertumbuhan Toba kembali di atas 4 persen, yakni sebesar 4,24 persen pada tahun 2022 dan 4,93 persen pada tahun 2023. Hal ini juga dipengaruhi oleh adanya pelaksanaan beberapa event internasional di Kabupaten Toba pada tahun 2023 yaitu F1H2O pada bulan Februari serta event Aquabike pada bulan November.

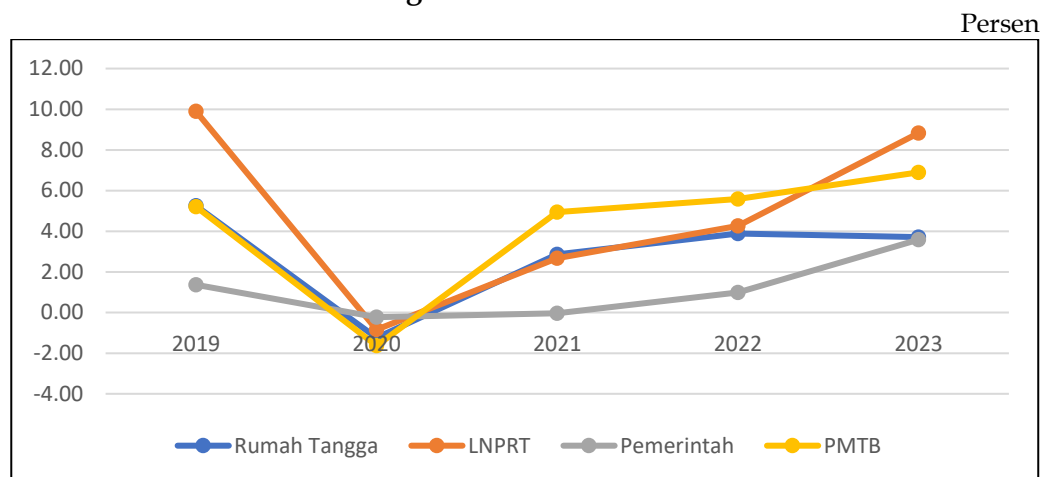
Tabel 3.4. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Toba ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2019	2020	2021	2022*)	2023**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,25	-1,24	2,86	3,88	3,70
2. Konsumsi LNPRT	9,90	-0,84	2,67	4,26	8,83
3. Konsumsi Pemerintah	1,36	-0,23	-0,04	0,99	3,58
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,20	-1,63	4,94	5,58	6,89
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	2,04	-6,25	7,49	8,14	-2,65
7. Impor Barang dan Jasa	0,77	-9,67	8,57	8,08	-6,17
PDRB	4,85	-0,27	2,92	4,24	4,93

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Grafik 3.2. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Toba ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023



Pada Grafik 3.2 terlihat bahwa secara umum, PDRB beserta komponen pembentuknya mengalami peningkatan pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah komponen pengeluaran konsumsi akhir LNPRT.

Tabel 3.5. Indeks Implisit PDRB Kabupaten Toba Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022 ^{*)}	2023 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	147,67	150,39	152,47	157,19	164,42
2. Konsumsi LNPRT	131,45	134,82	136,94	139,38	149,44
3. Konsumsi Pemerintah	135,90	135,10	137,28	138,55	145,85
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	148,23	150,28	155,26	159,28	165,37
5. Perubahan Inventori	136,79	141,72	148,66	161,29	163,35
6. Ekspor Barang dan Jasa	129,52	137,23	147,02	152,71	177,57
7. Impor Barang dan Jasa	141,99	147,80	157,56	159,29	199,33
PDRB	139,46	142,93	146,33	151,89	156,28

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Indeks implisit PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Pada Tabel 3.5 dapat dilihat tingkat kenaikan

harga selama periode tahun 2019-2023, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Komponen pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) menempati porsi terbesar dalam pembentukan PDRB menurut pengeluaran. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar produk domestik regional bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Toba digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Tabel 3.6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Toba Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022 ^{*)}	2023 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga (Miliar Rp)					
a. ADHB	4.262,74	4.287,31	4.470,74	4.788,19	5.193,89
b. ADHK 2010	2.886,65	2.850,75	2.932,28	3.046,16	3.158,98
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	55,54	54,65	54,09	53,54	53,79
Rata-rata konsumsi per-kapita per tahun (Juta Rp)					
a. ADHB	23,22	20,90	21,49	22,70	24,29
b. ADHK 2010	15,73	13,90	14,09	14,44	14,77
Pertumbuhan					
a. Total Konsumsi RT	5,25	-1,24	2,86	3,88	3,70
b. Per kapita	4,80	-11,62	1,41	2,45	2,30
Jumlah Penduduk *	183.566	205.114	208.045	210.960	213.850

* Jumlah penduduk 2019 menggunakan proyeksi SUPAS 2015
Jumlah penduduk 2020-2023 menggunakan hasil proyeksi penduduk SP2020

^{*)} Angka Sementara
^{**)} Angka Sangat Sementara

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa pada periode tahun 2019 – 2023 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selama periode 2019-2023, proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB selalu berada di atas 50 persen. Pada tahun 2023 porsi pengeluaran rumah tangga adalah sebesar 53,79 persen, mengalami peningkatan dari 53,54 persen pada tahun 2022.

Berdasarkan PDRB ADHK 2010, konsumsi akhir per kapita 2019 tumbuh 4,80 persen, kemudian mengalami kontraksi pada tahun 2020 hingga 11,62 persen. Di tahun 2023, pertumbuhan konsumsi rumah tangga per kapita mengalami percepatan pertumbuhan sebesar 2,30 persen.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga ADHK 2010 sebesar 5,25 persen pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 pertumbuhan konsumsi rumah tangga berkontraksi sebesar -1,24 persen, dan kemudian pada tahun 2021 hingga 2023 pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini sudah semakin membaik hingga sebesar 3,70 persen pada tahun 2023. Pertumbuhan ini juga dipengaruhi oleh adanya event internasional yang diadakan di Kabupaten Toba pada tahun 2023 yaitu event F1H2O pada bulan Februari dan event Aquabike pada bulan November.

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam pembentukan PDRB menurut pengeluaran sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Dalam kurun waktu tahun 2019-2023, kontribusi komponen ini dalam perekonomian Kabupaten Toba hanya berkisar 1,62-1,75 persen dari total perekonomian Kabupaten Toba. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2023 yang sebesar 1,75 persen.

Tabel 3.7. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT Kabupaten Toba Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022 ^{*)}	2023 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT (Miliar Rp)					
a. ADHB	128,85	131,03	136,66	145,03	169,21
b. ADHK 2010	98,02	97,19	99,79	104,05	113,23
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	1,68	1,67	1,65	1,62	1,75
Pertumbuhan (ADHK 2010)	9,93	-0,84	2,67	4,26	8,83

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam pembentukan PDRB menurut pengeluaran sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Dalam kurun waktu tahun 2019-2023, kontribusi komponen ini dalam perekonomian Kabupaten Toba hanya berkisar 1,62-1,75 persen dari total perekonomian Kabupaten Toba. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2023 yang sebesar 1,75 persen.

Ditinjau dari pertumbuhannya, pada tahun 2019, pertumbuhan komponen LNPRT sebesar 9,90 persen. Namun, pada tahun 2020, laju pertumbuhan konsumsi LNPRT mengalami kontraksi menjadi -0,84 persen akibat pengaruh dari dampak pandemi Covid-19. Kemudian pada tahun 2021, laju pertumbuhan konsumsi LNPRT mengalami percepatan menjadi 2,67 persen, pada tahun 2022 sebesar 4,26 persen, dan sebesar 8,83 persen pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa konsumsi LNPRT sudah lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa

pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Tabel 3.8. Perkembangan Komponen Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022 ^{*)}	2023 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah (Miliar Rp)					
a. ADHB	1.146,64	1.137,24	1.155,18	1.177,41	1.283,90
b. ADHK 2010	843,72	841,79	841,45	849,81	880,27
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	14,94	14,50	13,97	13,16	13,30
Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita (Juta Rp)					
a. ADHB	6,25	5,54	5,55	5,58	6,00
b. ADHK 2010	4,60	4,10	4,04	4,03	4,12
Rata-rata konsumsi per- pegawai pemerintah (Juta Rp)					
a. ADHB	265,24	275,03	273,61	270,55	276,34
b. ADHK 2010	195,17	203,58	199,30	195,27	189,47
Pertumbuhan					
a. Total Konsumsi Pemerintah	1,36	-0,23	-0,04	0,99	3,58
b. Per Kapita	0,92	-10,71	-1,45	-0,40	2,18
c. Per Pegawai Pemerintah	38,80	4,31	-2,10	-2,02	-2,97
Jumlah Pegawai Pemerintah	4.323	4.135	4.222	4.352	4.646
Jumlah Penduduk *	183.566	205.114	208.045	210.960	213.850

* Jumlah penduduk 2019 menggunakan proyeksi SUPAS 2015
Jumlah penduduk 2020-2023 menggunakan hasil proyeksi penduduk SP2020

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHB menunjukkan penurunan pada periode 2019-2020, dan kemudian pada tahun 2021 hingga 2023 meningkat kembali. Pada tahun 2019 total pengeluaran konsumsi pemerintah ADHB sebesar 1.146,64 miliar rupiah, menurun menjadi 1.137,24 miliar rupiah pada tahun 2020, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 1.155,18 miliar rupiah, dan pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 1.177,41 miliar rupiah dan menjadi 1.283,90 miliar pada tahun 2023. Akan tetapi pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHB 2010 selama periode 2019-2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 bernilai 843,72 miliar rupiah, menjadi 841,79 miliar rupiah pada tahun 2020, kemudian menurun menjadi 841,45 miliar rupiah pada tahun 2021. Akan tetapi pada tahun 2022 nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah meningkat menjadi 849,81 miliar rupiah dan meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 880,27.

Jika dilihat berdasarkan kontribusinya terhadap total PDRB Kabupaten Toba, peranan pengeluaran konsumsi akhir pemerintah cenderung menurun selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2019, pengeluaran konsumsi pemerintah memberikan kontribusi sebesar 14,94 persen terhadap total PDRB Kabupaten Toba, nilai tersebut menurun hingga hanya menjadi sebesar 13,30 persen pada tahun 2023.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung.

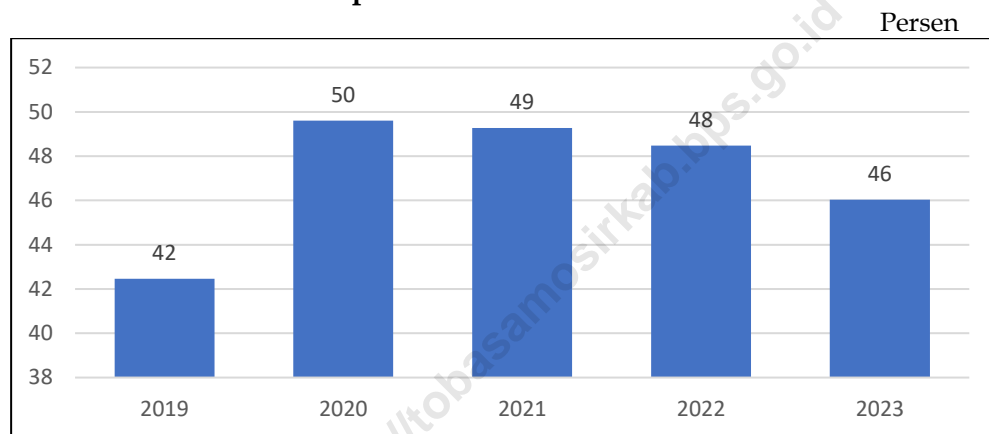
Apabila dilihat dari nilai rata-rata konsumsi pemerintah per kapita ADHB 2010, pada tahun 2019, rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita sebesar 4,60 juta rupiah, menurun hingga menjadi 4,03 juta rupiah pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023, nilai ini mengalami peningkatan menjadi 4,12 juta rupiah. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2023, biaya yang dikeluarkan pemerintah di Kabupaten Toba untuk melayani setiap penduduk Kabupaten Toba adalah sebesar 4,12 juta rupiah.

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah ADHB selama mengalami peningkatan pada tahun 2023. Pada tahun 2021, rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah sebesar 273,61 juta rupiah, menjadi 270,55 juta rupiah pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 276,34 juta rupiah pada tahun 2023.

Pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah perkapita (ADHK 2010) menunjukkan pola yang tidak jauh berbeda dengan pola pengeluaran konsumsi pemerintah ADHK 2010. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah per kapita pada tahun 2023 adalah 2,18 persen.

Hal lain yang dapat dicermati adalah rasio, yaitu perbandingan antara jumlah penduduk dengan jumlah pegawai pemerintah. Selama kurun waktu 2021-2023, jumlah pegawai pemerintah di Kabupaten Toba meningkat dari berjumlah 4.222 pada tahun 2021 menjadi 4.646 pada tahun 2023. Hal ini sejalan dengan jumlah penduduk yang meningkat dari sejumlah 208.045 pada tahun 2021 meningkat menjadi 213.850 pada tahun 2023. Hal ini berarti, setiap pegawai pemerintah pada tahun 2023 melayani sekitar 46 penduduk.

Grafik 3.3. Rasio Jumlah Penduduk dengan Jumlah Pegawai Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2019-2023



3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Sama halnya dengan pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, PMTB juga mengalami peningkatan pada tahun 2023 baik secara ADHB maupun ADHK 2010. Jika dilihat dari peranannya terhadap PDRB, proporsi PMTB cenderung menurun pada periode 2019-2020. Akan tetapi dari tahun 2020 hingga 2023, proporsi PMTB ini mengalami peningkatan. Proporsi PMTB terbesar selama lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2023 sebesar 21,87 persen.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) sub-komponen, yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Bila dilihat menurut kedua sub-komponen pembentuknya, PMTB bangunan memberikan kontribusi yang jauh lebih besar dibandingkan PMTB non-bangunan. Pada tahun 2019, PMTB bangunan sebesar 1.484,52 miliar rupiah atau sebesar 91,37 persen terhadap total PMTB, meningkat hingga menjadi 1.917,60 miliar rupiah dengan kontribusi yang cenderung menurun (sebesar 90,81 persen terhadap total PMTB pada tahun 2023).

Tabel 3.9. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Toba Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022 ^{*)}	2023 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB (Miliar Rp)					
a. ADHB	1.624,75	1.620,30	1.756,65	1.902,70	2.111,74
b. ADHK 2010	1.096,07	1.078,16	1.131,41	1.194,58	1.276,95
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	21,17	20,65	21,25	21,27	21,87
Struktur PMTB					
a. Bangunan (Miliar Rp)	1.484,52	1.467,64	1.594,40	1.725,41	1.917,60
Persentase (%)	91,37	90,58	90,76	90,68	90,81
b. Non Bangunan (Miliar Rp)	140,23	152,66	162,25	177,29	194,15
Persentase (%)	8,63	9,42	9,24	9,32	9,19
Total PMTB (Miliar Rp)	1.624,75	1.620,30	1.756,65	1.902,70	2.111,74
Persentase (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan (%)					
a. Bangunan	5,03	(2,28)	5,03	5,72	7,56
b. Non Bangunan	6,48	3,26	4,28	4,61	2,00
Total PMTB	5,20	(1,63)	4,94	5,58	6,89

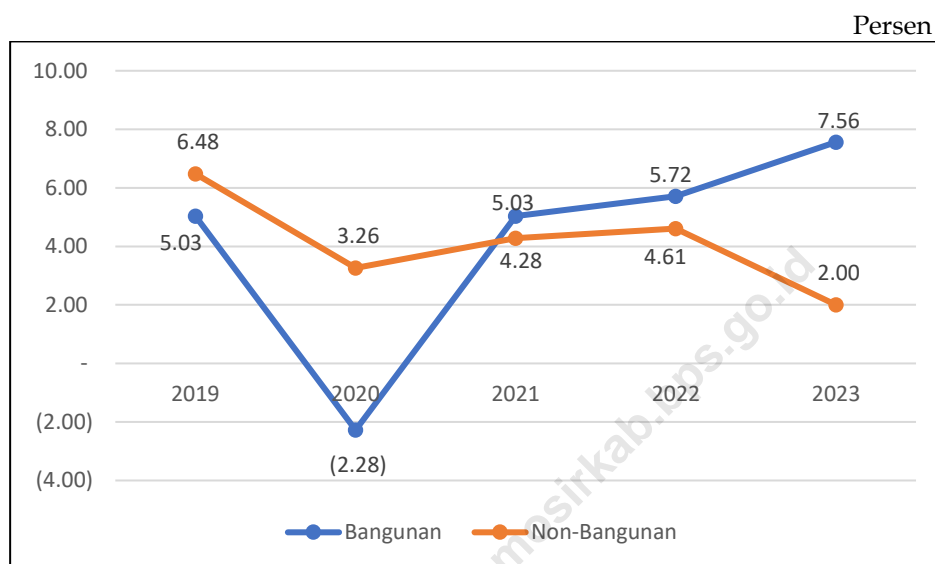
^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Pada tabel 3.9 menjelaskan bahwa pertumbuhan PMTB secara keseluruhan pada periode 2019-2020 mengalami penurunan dari sebesar 5,20 persen pada tahun 2019 menjadi -1,63 persen pada tahun 2020, dan kemudian pada tahun 2021 pertumbuhan PMTB kembali positif yaitu sebesar 4,94 persen, meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi sebesar 5,58 persen, hingga pada tahun 2023 menjadi 6,89 persen. Demikian halnya dengan PMTB bangunan, pada tahun 2019 PMTB bangunan tumbuh sebesar 5,03 persen mengalami kemudian berkontraksi pada tahun 2020 menjadi sebesar -2,28 persen, dan kemudian pertumbuhannya kembali positif hingga mencapai sebesar 7,56 persen pada tahun 2023. Pertumbuhan yang cukup tinggi pada tahun 2023 juga termasuk pengaruh dari adanya

pembangunan untuk mendukung pelaksanaan event internasional yang diadakan di Kabupaten Toba yaitu event F1H2O pada bulan Februari dan event Aquabike pada bulan November. Sementara, pertumbuhan PMTB non-bangunan cenderung fluktuatif selama periode 2019-2023 namun tetap dengan nilai pertumbuhan positif. Adapun pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 6,48 persen.

Grafik 3.4. Laju Pertumbuhan Sub Komponen PMTB Kabupaten Toba Tahun 2019-2023



3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk **“persediaan”** berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis lebih rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam

pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada pada komponen pengeluaran lainnya. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi, baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Tabel 3.10. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Toba Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022 ^{*)}	2023 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Perubahan Inventori (Miliar Rp)					
a. ADHB	95,94	109,05	116,43	130,27	130,65
b. ADHK 2010	70,14	76,94	78,32	80,77	79,98
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	1,25	1,39	1,41	1,46	1,35

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Secara umum, selama periode 2019-2023 nilai perubahan inventori bertanda positif, artinya terjadi penambahan persediaan setiap tahun. Pada tahun 2019 perubahan inventori sebesar 95,94 miliar rupiah atau menyumbang sebesar 1,25 persen terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Toba. Pada tahun 2023, perubahan inventori mampu menyumbang sebesar 1,35 persen atau sebesar 130,65 miliar rupiah.

3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Toba, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Pada tahun 2019, nilai ekspor Kabupaten Toba ADHB mencapai 3.185,83 miliar rupiah meningkat hingga menjadi 4.633,27 miliar rupiah pada tahun 2023. Namun, walaupun nilainya meningkat, proporsinya terhadap nilai total PDRB sempat mengalami penurunan selama periode 2019-2020. Akan tetapi sejak 2020, kontribusi ekspor terhadap total PDRB terus meningkat hingga tahun 2023. Pada tahun 2023 nilai ekspor mampu menyumbang sebesar 47,98 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Toba.

Selain itu, laju pertumbuhan total ekspor pada tahun 2019-2023 juga mengalami penurunan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yang mencapai 8,14 persen. Sementara itu pertumbuhan minus terjadi pada tahun 2020 sebesar -6,25 persen dan pada tahun 2023 sebesar -2,65 persen.

Tabel 3.11. Perkembangan Ekspor Kabupaten Toba Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022 ^{*)}	2023 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor (Miliar Rp)					
a. ADHB	3.185,83	3.164,40	3.644,16	4.093,31	4.633,27
b. ADHK 2010	2.459,63	2.305,87	2.478,62	2.680,37	2.609,25
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	41,51	40,33	44,09	45,77	47,98
Pertumbuhan (%)	2,04	-6,25	7,49	8,14	-2,65

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

3.8 PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPR, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor, sedangkan PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Indonesia. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor.

Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Toba di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Toba terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri.

Data pada Tabel 3.12 menunjukkan bahwa secara total nilai impor barang dan jasa ADHB Kabupaten Toba pada tahun 2019 mencapai 2.769,37 miliar rupiah. Dan pada tahun 2023 nilai impor barang dan jasa meningkat menjadi 3.866,39 miliar rupiah. Sementara itu, proporsi impor barang dan jasa terhadap pembentukan PDRB selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, proporsi impor barang dan jasa terhadap total PDRB mencapai 33,19 persen, namun pada tahun 2023 meningkat menjadi 40,04 persen.

Tabel 3.12. Perkembangan Impor Kabupaten Toba Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022 ^{*)}	2023 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor (Miliar Rp)					
c. ADHB	2.769,37	2.603,91	3.013,71	3.293,02	3.866,39
d. ADHK 2010	1.950,46	1.761,79	1.912,77	2.067,37	1.939,71
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	36,08	33,19	36,46	36,82	40,04
Pertumbuhan (%)	0,77	-9,67	8,57	8,08	-6,17

^{*)} Angka Sementara

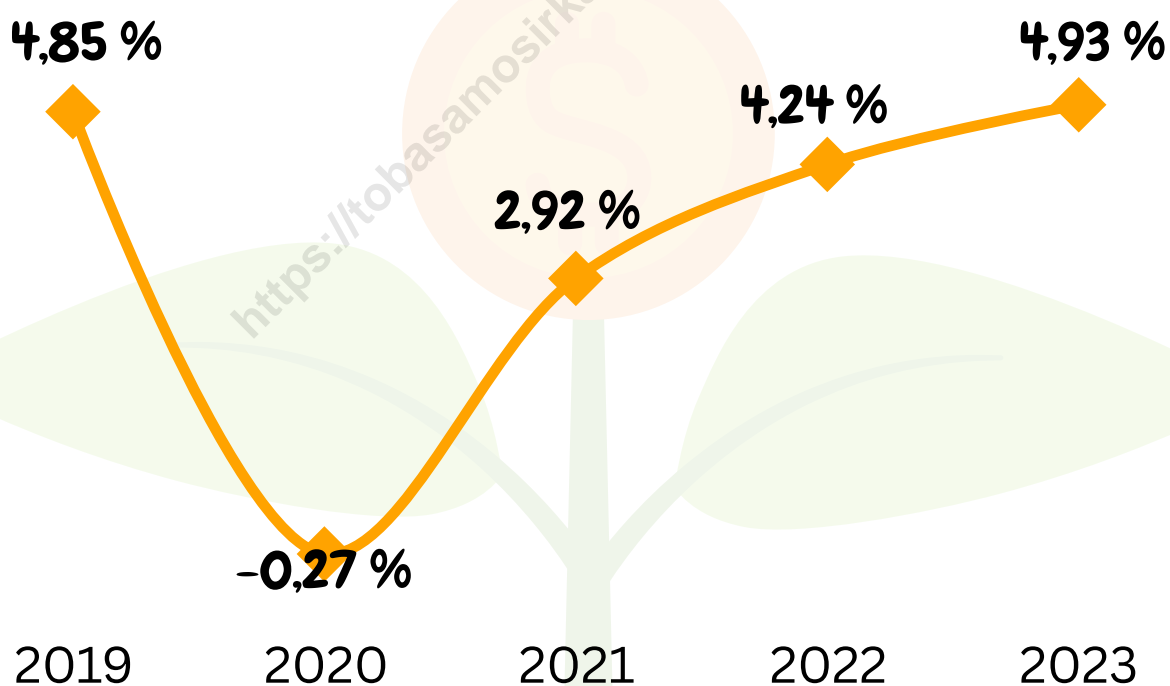
^{**)} Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan secara riil nilai impor mengalami fluktuasi. Pertumbuhan tertinggi selama lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 8,57 persen. Sedangkan pada tahun 2023, pertumbuhan impor barang dan jasa mengalami kontraksi menjadi -6,17 persen.

BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KABUPATEN TOBA

PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN TOBA 2019-2023



BAB IV
PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN
KABUPATEN TOBA 2019-2023

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Toba Samosir di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari *series* data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB per kapita.

Tabel 4.1. PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Toba Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022 ^{*)}	2023 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
a. ADHB	7.675,39	7.845,42	8.266,13	8.943,89	9.656,27
b. ADHK 2010	5.503,76	5.488,92	5.649,10	5.888,38	6.178,95
PDRB Perkapita (Juta Rp)					
a. ADHB	41,81	38,20	39,73	42,40	45,15
b. ADHK 2010	29,98	26,73	27,15	27,91	28,89
Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK 2010 (%)	4,40	-10,85	1,59	2,80	3,52

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

PDRB per kapita pada tahun 2019 sebesar 41,81 juta rupiah mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 38,20 juta rupiah akibat dampak pandemi Covid-19, yang

kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 39,73 juta rupiah, hingga pada tahun 2023 mencapai 45,15 juta rupiah. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Toba rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar 45,15 juta rupiah pada tahun 2023.

Pertumbuhan PDRB per kapita secara riil mengalami kontraksi pada tahun 2020. Pada tahun 2020, PDRB per-kapita ADHK 2010 mencapai 26,73 juta rupiah mengalami kontraksi sebesar -10,85 persen. Kemudian pada tahun 2021, laju pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010 kembali bernilai positif yaitu sebesar 1,59 persen dengan nilai 27,15 juta rupiah. Dan pada tahun 2023 laju pertumbuhan PDRB per kapita juga bernilai positif yakni sebesar 3,52 persen.

4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Konsumsi akhir adalah pengeluaran berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 4.2. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Toba Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022 ^{*)}	2023 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	4.262,74	4.287,31	4.470,74	4.788,19	5.193,89
b. LNPRT	128,85	131,03	136,66	145,03	169,21
c. Pemerintah	1.146,64	1.137,24	1.155,18	1.177,41	1.283,90
Jumlah	5.538,24	5.555,59	5.762,58	6.110,63	6.647,00
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	7.675,39	7.845,42	8.266,13	8.943,89	9.656,27
Proporsi (Persen)	72,16	70,81	69,71	68,32	68,84

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa selama periode 2019-2023, sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik Kabupaten Toba digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir yaitu hampir 70 persen. Dalam kurun waktu 2019 hingga 2023, proporsi pengeluaran konsumsi akhir terhadap total PDRB terbesar terjadi pada

tahun 2019 yaitu sebesar 72,16 persen atau sebesar 5.538,24 miliar rupiah. Sedangkan proporsi terkecil terjadi pada tahun 2022 yakni sebesar 68,32 persen dari total PDRB atau sebesar 6.110,63 miliar rupiah.

<https://tobasamosirkab.bps.go.id>

BAB V

PENUTUP

PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PENGELUARAN 2023

PKRT



3,70 %

PK-LNPRT



8,83 %

PKP



3,58 %

PMTB



6,89 %

BAB V

PENUTUP

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2019 s.d 2023 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Toba pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2019 s.d 2023, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Toba terhadap ekonomi luar daerah.



TABEL - TABEL

<https://kobotamოსირკაბ.bps.go.id>

TABEL-TABEL

Tabel 6.1

**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Toba ADHB
Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023**

Miliar Rp

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.262,74	4.287,31	4.470,74	4.788,19	5.193,89
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	128,85	131,03	136,66	145,03	169,21
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.146,64	1.137,24	1.155,18	1.177,41	1.283,90
4. PMTB	1.624,75	1.620,30	1.756,65	1.902,70	2.111,74
5. Perubahan Inventori	95,94	109,05	116,43	130,27	130,65
6. Ekspor	3.185,83	3.164,40	3.644,16	4.093,31	4.633,27
7. Impor	2.769,37	2.603,91	3.013,71	3.293,02	3.866,39
PDRB	7.675,39	7.845,42	8.266,13	8.943,89	9.656,27

*)Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Tabel 6.2

**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Toba ADHK 2010
Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023**

Miliar Rp

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.886,65	2.850,75	2.932,28	3.046,16	3.158,98
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	98,02	97,19	99,79	104,05	113,23
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	843,72	841,79	841,45	849,81	880,27
4. PMTB	1.096,07	1.078,16	1.131,41	1.194,58	1.276,95
5. Perubahan Inventori	70,14	76,94	78,32	80,77	79,98
6. Ekspor	2.459,63	2.305,87	2.478,62	2.680,37	2.609,25
7. Impor	1.950,46	1.761,79	1.912,77	2.067,37	1.939,71
PDRB	5.503,76	5.488,92	5.649,10	5.888,38	6.178,95

*)Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 6.3

**Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Toba ADHB
Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022**

Persen

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	55,54	54,65	54,09	53,54	53,79
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,68	1,67	1,65	1,62	1,75
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	14,94	14,50	13,97	13,16	13,30
4. PMTB	21,17	20,65	21,25	21,27	21,87
5. Perubahan Inventori	1,25	1,39	1,41	1,46	1,35
6. Ekspor	41,51	40,33	44,09	45,77	47,98
7. Impor	36,08	33,19	36,46	36,82	40,04
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*)Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 6.4

**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Toba
ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023**

Persen

Komponen Pengeluaran		2019	2020	2021	2022*	2023**
<i>(1)</i>		<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,25	-1,24	2,86	3,88	3,70
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,90	-0,84	2,67	4,26	8,83
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,36	-0,23	-0,04	0,99	3,58
4.	PMTB	5,20	-1,63	4,94	5,58	6,89
5.	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6.	Ekspor	2,04	-6,25	7,49	8,14	-2,65
7.	Impor	0,77	-9,67	8,57	8,08	-6,17
PDRB		4,85	-0,27	2,92	4,24	4,93

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 6.5

**Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Toba
ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023
(2010=100)**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	214,56	215,79	225,03	241,00	261,42
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	203,38	206,82	215,70	228,91	267,08
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	180,46	178,98	181,80	185,30	202,06
4. PMTB	193,91	193,37	209,65	227,08	252,03
5. Perubahan Inventori	119,15	135,42	144,59	161,77	162,24
6. Ekspor	217,66	216,19	248,97	279,65	316,54
7. Impor	193,13	181,59	210,17	229,65	269,63
PDRB	211,23	215,91	227,48	246,14	265,74

*)Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 6.6

**Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Toba
ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023
(2010=100)**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	145,29	143,49	147,59	153,32	159,00
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	154,72	153,41	157,51	164,23	178,72
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	132,78	132,48	132,42	133,74	138,53
4. PMTB	130,81	128,67	135,03	142,57	152,40
5. Perubahan Inventori	87,10	95,55	97,26	100,30	99,32
6. Ekspor	168,04	157,54	169,34	183,12	178,26
7. Impor	136,02	122,86	133,39	144,17	135,27
PDRB	151,46	151,05	155,46	162,05	170,04

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 6.7

**Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Toba
Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023
(2010=100)**

Komponen Pengeluaran		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	147,67	150,39	152,47	157,19	164,42
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	131,45	134,82	136,94	139,38	149,44
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	135,90	135,10	137,28	138,55	145,85
4.	PMTB	148,23	150,28	155,26	159,28	165,37
5.	Perubahan Inventori	136,79	141,72	148,66	161,29	163,35
6.	Ekspor	129,52	137,23	147,02	152,71	177,57
7.	Impor	141,99	147,80	157,56	159,29	199,33
PDRB		139,46	142,93	146,33	151,89	156,28

*)Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 6.8

**Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Toba Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023**

Persen

Komponen Pengeluaran		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,77	1,84	1,38	3,10	4,60
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-0,79	2,56	1,58	1,78	7,21
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,38	-0,59	1,62	0,92	5,27
4.	PMTB	-1,29	1,38	3,31	2,59	3,83
5.	Perubahan Inventori	1,65	3,60	4,90	8,49	1,28
6.	Ekspor	1,15	5,95	7,14	3,87	16,28
7.	Impor	0,10	4,09	6,60	1,10	25,14
PDRB		2,22	2,49	2,37	3,80	2,89

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Profil Ekonomi Rumahtangga 1998*, Jakarta 1999.
5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
6. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, WashingtonDC, 1979.
7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
8. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
9. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TOBA**

Jl. Somba Debata No.5 Onan Raja-Balige

Telp (0632) 21480, Fax (0632) 322194

Email : bps1206@bps.go.id

<https://tobakab.bps.go.id>